



## Implikasi Kerjasama Ekonomi Indonesia-China Bagi Indonesia: Studi Terhadap Project Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB)

Ahmad Aridho<sup>1</sup>, Al Firman<sup>2</sup>, Ruth Yessika Siahaan<sup>3</sup>, Jojor Mindo<sup>4</sup>, Armando Fidelis Wuwu<sup>5</sup>, Prayetno<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

Email: [ahmadaridho77@gmail.com](mailto:ahmadaridho77@gmail.com)<sup>1</sup>, [alfirmanmangunsong58@gmail.com](mailto:alfirmanmangunsong58@gmail.com)<sup>2</sup>, [ruthyessika72@gmail.com](mailto:ruthyessika72@gmail.com)<sup>3</sup>, [jojormindomanullang29@gmail.com](mailto:jojormindomanullang29@gmail.com)<sup>4</sup>, [mandowuwu@gmail.com](mailto:mandowuwu@gmail.com)<sup>5</sup>, [prayetno@unimed.ac.id](mailto:prayetno@unimed.ac.id)<sup>6</sup>

**Abstract:** *Indonesia's relations with China have been established diplomatically for more than 60 years, in some sources it is said that this relationship cannot be separated from Indonesia's foreign policy which is free and active in viewing international political constellations during the cold role, Foreign policy is a strategy or action plan designed by state decision makers to deal with other countries or any other international political entity, with the specific aim of achieving national interests defined in terms of national interests. Foreign actions taken by the government of a country aimed at fulfilling the national interests of a nation are carried out by the authorities at the time The cooperation between Indonesia and China in the construction of the Jakarta-Bandung high-speed train began with China's efforts to attract Indonesia's attention when President Jokowi attended the 22nd meeting of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Beijing, China in November 2014.*

**Keywords:** *International relations, Indonesia-China relations, foreign policy, Indonesia-China cooperation*

**Abstrak.** Hubungan Indonesia dengan China telah terjalin secara diplomatik lebih dari 60 tahun, dalam beberapa sumber dikatakan bahwa hubungan ini terjalin tidak lepas dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam memandang konstelasi politik internasional pada masa peran dingin. Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dirancang oleh pengambil keputusan negara untuk menghadapi negara lain atau entitas politik internasional lainnya, dengan tujuan khusus untuk mencapai kepentingan nasional yang diartikan dalam istilah kepentingan nasional. Tindakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional suatu bangsa yang dijalankan oleh pihak yang berwenang pada saat itu Kerjasama Indonesia dan China dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung diawali dari upaya China menarik perhatian Indonesia saat Presiden Jokowi hadir dalam pertemuan ke 22 Konferensi Tingkat Tinggi(KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC) di Beijing, China pada bulan november 2014.

**Kata Kunci:** Hubungan internasional, hubungan indonesia dengan china, kebijakan luar negeri, kerjasama indonesia dengan china

### PENDAHULUAN

Hubungan Indonesia dengan China telah terjalin secara diplomatik lebih dari 60 tahun, dalam beberapa sumber dikatakan bahwa hubungan ini terjalin tidak lepas dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam memandang konstelasi politik internasional pada masa peran dingin. Objektivitas pembangunan infrastruktur Indonesia dibawah pemerintahan joko widodo adalah pembangunan maritim. Pengertian maritim disini tidak hanya sekedar membangun industri kelautan melainkan posisi geografis Indonesia yang sebagai negara kepulauan, maka pembangunan infrastruktur di harapkan menyesuaikan kontur dan karakter wilayah di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur di fokuskan pada sektor transportasi, akses jalan raya, pelabuhan, bandara, bendungan dan listrik. Di era Presiden Joko Widodo "kedekatan" Indonesia san China semakin erat yang dibuktikan dengan banyaknya

Received September 07, 2023; Revised Oktober 07, 2023; Accepted November 16, 2023

\* Ahmad Aridho, [ahmadaridho77@gmail.com](mailto:ahmadaridho77@gmail.com)

kerjasama bilateral diantara dua negara.Salah satu menjadi highlight mengenai kerjasama Indonesia-China adalah pembangunan kereta cepat(high speed railway) antara Jakarta-Bandung dengan jarak kurang tempuh kurang lebih 142,3 km.Kerjasama kereta dengan skema B to B ini merupakan hasil pembicaraan yang intens antara kedua negara pasca terpilihnya perusahaan kereta api China Railway International Co.Ltd dalam tender yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Kerjasama ini menyepakati dibentuknya konsorsium dalam melaksanakan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung,BUMN INDONESIA dan BUMN CHINA membentuk anak usaha patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China.Kerjasama ini dilakukan melalui anak usaha BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia(PSBI) dan China Railway International Co.Ltd.Pt Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) adalah perusahaan patungan konsorsium BUMN Indonesia terdiri dari PT Perkebunan Nusantara VIII.Terjalannya kerjasama pembangunan kereta cepat JakartaBandung antara Indonesia -China membuktikan bahwa kedua negara memiliki kepentingan yang kuat dalam kerjasama dibidang ekonomi dan infrastruktur. Kereta cepat itu sendiri awalnya direncanakan sepanjang 763km yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya.Pihak Istana Kepresidenan mengatakan masih ingin membangun kereta api kecepatan tinggi yang menjangkau seluruh pulau Jawa.Dalam tataran kebijakan, kereta cepat adalah salah satu bentuk dari pembangunan modernisasi di Indonesia untuk meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan massal di daerah perkotaan dan layanan angkutan antar kota yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional (PKN)serta akses ke Pelabuhan dan Bandara dan mendukung angkutan barang dan logistik nasional.

Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dirancang oleh pengambil keputusan negara untuk menghadapi negara lain atau entitas politik internasional lainnya, dengan tujuan khusus untuk mencapai kepentingan nasional yang diartikan dalam istilah kepentingan nasional. Tindakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional suatu bangsa yang dijalankan oleh pihak yang berwenang pada saat itu. Kebijakan luar negeri adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain. Kebijakan luar negeri dapat mencakup berbagai hal seperti perdagangan, diplomasi, dan keamanan nasional. Kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sejarah, budaya, dan kepentingan nasional. Negara-negara dapat memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda-beda tergantung pada tujuan dan kepentingan mereka.

Pemerintah mengantisipasi bahwa proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mungkin akan mengalami penundaan lebih lanjut karena tantangan geografis dan geologis yang menghambat kemajuannya. Dalam pengumuman resmi, PT KCIC menyatakan bahwa jadwal operasional kereta api akan dimulai pada akhir Juni 2023, yang merupakan keterlambatan empat tahun dari jadwal awalnya (KCIC, 2022). Perpanjangan waktu ini juga diperkirakan akan berdampak pada ekspektasi kinerja kereta yang diharapkan oleh masyarakat. Umumnya, harapan masyarakat adalah bahwa proyek kereta api akan mengurangi masalah kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi udara, dan memperpendek waktu perjalanan. Selain itu, pemerintah juga berharap bahwa proyek ini akan membawa peluang investasi tambahan ke Indonesia. Meskipun demikian, sejak awal pembangunan proyek, banyak pihak telah mengungkapkan kekhawatiran tentangnya. Kekhawatiran ini mencakup evaluasi yang kurang memadai mengenai dampak lingkungan proyek dan keterbatasan dalam konsultasi dengan masyarakat terkait pengadaan lahan. Metode pendekatan yang digunakan kelompok Dua yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan praktek yaitu “Implikasi kerjasama ekonomi INDONESIA-CHINA bagi INDONESIA: Studi terhadap project KCJB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Jenis Teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Kerjasama Indonesia-China Dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung**

Kerjasama Indonesia dan China dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung diawali dari upaya China menarik perhatian Indonesia saat Presiden Jokowi hadir dalam pertemuan ke 22 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing, China pada bulan november 2014. Dengan salah satu bahasan utama adalah memperkuat pengembangan konfrehensif di bidang infrastruktur dan konektivitas. Dalam pertemuan ini presiden Jokowi juga mencoba langsung infrastruktur kereta

cepat di China dengan rute Beijing-Tiajin jarak 120km dengan waktu tempuh 33 menit. Kemudian Jokowi tertarik dengan kereta cepat buatan China. Pada Maret 2015, Jokowi melakukan kunjungan ke China untuk menemui Xi Jinping. Dimana agenda kunjungan ini sebagai tindak lanjut dari janji investasi yang sebelumnya disampaikan pada saat KTT APEC. Sehingga ada rencana investasi China di Indonesia yang bernilai US\$ 63,4 miliar. Kemudian Xi Jinping menghadiri KAA di Indonesia. hubungan kedua negara ini di tindak lanjuti oleh beberapa menteri untuk menandatangani kesepakatan beberapa kerjasama Indonesia dan China. Salah satu kerjasama yang di sepakati yaitu proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerjasama Indonesia dan China dalam kereta cepat dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan kerjasama yang disepakati untuk tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBN, namun kerjasama ini menggunakan dana dengan skema Business To Business oleh konsorsium perusahaan Indonesia PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan kepemilikan saham 60% dan konsorsium perusahaan China China railway Internasional Co.Ltd dengan kepemilikan saham 40%. Skema ini menyepakati dibentuknya konsorsium dengan nama PT. Kereta Cepat Indonesia China(KCIC) sebagai pelaksana pembangunan dan pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung.

### **Kendala Yang di Hadapi Indonesia Dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung**

Kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami beberapa kendala dalam proses pembangunannya yaitu masalah izin dan pembebasan lahan kerjasama kereta api cepat di sepakati pada maret 2015 dan groundbreaking pada januari 2016 namun baru di mulai pembangunan pada 2018, ini karena kendala izin dan pembebasan lahan yang terkendala oleh tumpang tindihnya kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengakibatkan kucuran dana dari China untuk pembangunan kereta cepat Jakarta- Bandung tertahan. Kendala yang di sebabkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah pembangunan kereta cepat melintasi sembilan kota/kabupaten, dimana empat diantaranya terhambat. Izin penetapan lokasi menjadi dasar untuk pembebasan lahan. Penyebabnya dikarenakan kurangnya komunikasi antara PT. KCIC sebagai pihak dari pembangunan kereta cepat dengan pemerintah daerah menjadi penyebab kendala terhambatnya izin kereta cepat karena kurangnya komunikasi kedua pihak untuk kejelasan mengenai ganti untung yang di tujukan bagi masyarakat yang terdampak dan pembangunan infrastruktur di wilayah yang bersinggungan dengan kereta cepat.

## **Upaya Yang Dilakukan Indonesia Dalam Merealisasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung**

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam merealisasikan kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung diantaranya mengeluarkan Perpres tentang penyesuaian tata ruang wilayah dan penggunaan tenaga kerja asing. Dengan tujuan meningkatkan pelayanan transportasi yang akan mendukung pembangunan di wilayah Jakarta-Bandung dilakukan percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung yang tercantum dalam peraturan presiden No. 107 tahun 2015 kebijakan ini diambil sebagai bentuk upaya modernisasi pembangunan angkutan masal di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di sebutkan dalam perpres bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar memberikan kemudahan dalam hal perizinan, fasilitas perpajakan serta biaya perizinan. Dalam pasal ini juga mengatur penyesuaian bagi pemerintah daerah agar menyesuaikan tata ruang wilayah yang di jadikan untuk pembangunan jalur kereta cepat.<sup>16</sup> Adapun upaya lain untuk mendukung peningkatan investasi Indonesia agar meningkatkan ekonomi nasional dan kesempatan kerja dengan mengatur kembali izin penggunaan tenaga kerja asing dengan pertimbangan tersebut di keluarkan perpres No. 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing. Dalam perpres ini mengatur penggunaan tenaga kerja asing dengan mempertimbangkan kondisi tenaga kerja lokal, kemudian penggunaan tenaga kerja lokal di utamakan. Pengaturan jabatan tertentu bagi tenaga kerja asing yang harus juga di isi oleh tenaga kerja Indonesia dan melarang tenaga kerja asing menduduki jabatan personalia. Penggunaan tenaga kerja asing harus dengan alasan yang kuat dan bagi pemberi tenaga kerja asing harus 10 harus terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari 6 bulan.<sup>17</sup>

## **Prospek Kerjasama Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung**

Terhadap Perkembangan Pembangunan Insfratraktur Dan Ekonomi Di Indonesia Prospek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung salah satunya adalah transfer teknologi kereta cepat yang diharapkan Indonesia dan China dapat bekerjasama membangun kereta cepat di negara lain dan dapat membangun kereta cepat secara mandiri. Alih teknologi kereta cepat direalisasikan dengan pelatihan dalam beberapa gelombang berkaitan dengan berbagai macam teknologi, dimana teknologi yang digunakan meliputi kontrol kereta cepat, persinyalan jalur dan lain sebagainya.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari implikasi kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China bagi Indonesia terhadap proyek KCJB adalah Pertumbuhan Ekonomi: Kerjasama ekonomi ini dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur: Proyek KCJB, yang mencakup pembangunan pelabuhan dan zona industri, dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam logistik serta mendorong perkembangan sektor industri di Indonesia. Investasi China: Dengan keterlibatan China dalam proyek-proyek ekonomi, Indonesia dapat mendapatkan akses ke sumber pendanaan yang besar. Namun, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa kesepakatan ini memberikan manfaat yang seimbang dan melindungi kepentingan nasional. Dampak Lingkungan: Perlu diingat bahwa proyek-proyek infrastruktur besar seperti KCJB dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan upaya mitigasi dampak lingkungan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan proyek ini. Keseimbangan Diplomatik: Indonesia perlu menjaga keseimbangan dalam hubungan diplomatik dengan China dan negara lainnya. Meskipun kerjasama ekonomi adalah hal yang positif, penting juga untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Keamanan Nasional: Indonesia harus memperhatikan aspek keamanan nasional dalam setiap kerjasama ekonomi dengan negara asing, termasuk China. Memastikan bahwa investasi dan proyek-proyek tersebut tidak membahayakan keamanan nasional adalah prioritas. Dengan demikian, kesimpulan keseluruhan adalah bahwa kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China, khususnya dalam proyek KCJB, memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi dan pembangunan, namun perlu dikelola dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif dan melindungi kepentingan nasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daris, Muhammad. “Kerjasama Indonesia-China Dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 2014-2018”.
- Tetama, Androvaga Renandra. “Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung: Memaknai Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah”. *Jurnal Widia Bumi*, Vol.2, No.2 (2022)
- Yamin, Muhammad. “ Pembangunan Kereta Xepat Jakarta -Bandung Sebagai Mercusuar Hubungan Indonesia-Tiongkok”. *Jurnal Politik Profetik*, Vol.5, No.2 (2017):
- Sianturi, Michael Owen. “ Kerjasama Indonesia dan Tiongkok Dalam Skema Bussiness To Bussiness Pada aianvestasi Transportasi Kereta Ceppat Jakarta-Bandung”. *Jurnal FISK*, Vol.3, No.1 (2022).
- HABRIANTO, T. H. (2021). *LATAR BELAKANG KERJASAMA INDONESIA DENGAN CINA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA–BANDUNG (KCJB)* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Yogyakarta).
- Kalicya, G., & Djajaputra, G. (2020). Tahap-Tahap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Utilitas Kereta Cepat Jakarta-Bandung. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 1457-1479.
- Tetama, A. R., Suharno, S., & Tyola, Y. N. (2022). Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Memaknai Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah. *Widya Bhumi*, 2(2), 136-151.